

# Analysis of the Effect of Regional Budget Policies and Poverty Levels on Community Welfare in North Sumatra 2014-2018

Oktavia Fajar Inayah<sup>1</sup> , Siti Aisyah, S.E., M.Si.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Department of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Department of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

 [oktaviafajar10@gmail.com](mailto:oktaviafajar10@gmail.com)

## **Abstract**

*This study aimed to analyze the effect of capital expenditure allocation, regional financing, fiscal capacity, and poverty levels on public by proxying Human Development Index data in North Sumatra. The method used was panel data regression with fixed effect model approach. The result indicated that regional financing was proven to not have an effect on public welfare. Meanwhile, capital expenditure allocation, fiscal capacity and poverty levels were all proven to have a positive impact on public welfare. In order to improve public welfare, the government was expected to optimize Regional Government Budget funds for strategic regional development targets. In field of poverty, the government was expected to run pro-poor, pro-job, and pro-growth programs. However, it places more emphasis on creating adequate employment opportunities. In this way the welfare of the community would increase.*

**Keywords:** North Sumatra; Poverty level; Public Welfare; Regional Government Budget

## **Analisis Pengaruh Kebijakan APBD dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Sumatra Utara Tahun 2014-2018**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi belanja modal, pembiayaan daerah, kapasitas fiskal, dan tingkat kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan data Indeks Pembangunan Manusia di Sumatra Utara. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, alokasi belanja modal, kapasitas fiskal, dan tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah diharapkan mengoptimalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk program pembangunan daerah yang strategis serta mencapai sasaran pembangunan yang ditargetkan. Dalam bidang kemiskinan, diharapkan pemerintah menjalankan program *pro-poor, pro-job, dan pro-growth*. Namun, lebih menekankan pada penciptaan lapangan kerja yang memadai. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

**Kata kunci:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Kesejahteraan Masyarakat; Sumatra Utara; Tingkat Kemiskinan

## **1. Pendahuluan**

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada dasarnya bertujuan membangun manusia seutuhnya, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tingkat layak hidup masyarakat yang diindikasikan oleh keadaan ekonomi serta kondisi sosial masyarakat [1]. Kesejahteraan diwujudkan agar masyarakat

hidup layak dan dapat mengembangkan diri sehingga mampu mengembangkan fungsi sosialnya dengan baik. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengamati kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam buku ekonomi pembangunan, Todaro menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara yang mengombinasikan pencapaian di bidang Pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan [2].

Capaian IPM Indonesia setiap tahunnya meningkat tetapi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 2018, Indonesia masih berada di peringkat keenam. Hal tersebut disebabkan oleh tidak meratanya kesejahteraan di masyarakat di 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan untuk Provinsi Sumatra Utara, ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat disebabkan salah satunya oleh tingkat kemiskinan. Ada beberapa kabupaten/kota di Sumatra Utara yang persentase penduduk miskinnya naik seperti Kabupaten Batu Bara dan Kota Tanjung Balai. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk tetapi tidak dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan lain, seperti peningkatan taraf kualitas pendidikan. Dengan tidak adanya peningkatan taraf pendidikan, maka penduduk di wilayah tersebut akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang kecil yang kemudian akan meningkatkan kemiskinan karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan gaji yang mereka dapat.

Otonomi daerah daerah telah menyebabkan pergeseran dalam paradigma pembangunan di Indonesia. Semula didasarkan pada asas sentralisasi, kemudian berubah menjadi desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahnya sendiri. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peran pemerintah daerah melalui APBD sebagai implementasi dari kebijakan keuangan daerah, diharapkan dapat berfungsi secara efisien dan efektif dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Secara umum, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah.

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui peran alokatif, dimana pemerintah harus menyusun kebijakan untuk mengalokasikan belanja daerah pada sektor yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal berperan penting guna mencapai tujuan tersebut [3]. Keadaan alokasi belanja modal di Sumatra Utara tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, alokasi belanja modal Sumatra utara mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan anggaran belanja modal, berdampak pada melambatnya konsumsi pemerintah. Dengan melambatnya konsumsi pemerintah, maka peningkatan fasilitas publik pun akan melambat. Penggunaan anggaran oleh pemerintah dapat dilihat sejauh mana belanja tersebut mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah daerah dari waktu ke waktu semakin meningkat karena semakin bertambahnya kegiatan pemerintah yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan daerah Provinsi Sumatra Utara mengalami fluktuasi. Hal tersebut disebabkan oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Semakin besar SiLPA, menunjukkan kurang cermatnya pemerintah dalam merencanakan anggaran dan penerapan anggaran yang kurang baik. Sehingga rasio SiLPA terhadap

belanja menampilkan jatah belanja yang tertunda ataupun anggaran yang tidak terserap [4].

Pelaksanaan otonomi daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya desentralisasi fiskal. Kapasitas fiskal merupakan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas fiskal Sumatra Utara dari tahun 2014-2016 masih dalam kategori rendah, artinya Sumatra Utara masih belum bisa mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya. Kapasitas fiskal yang rendah juga mengindikasikan bahwa anggaran yang tersedia tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak menyediakan fasilitas publik yang berkualitas. Guna mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat, pemerintah perlu meningkatkan pelayanan publik dan peran serta masyarakat agar terjadi pemerataan dan keadilan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel tingkat kemiskinan yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Karena ingin mengetahui kondisi masyarakat di Sumatra Utara. Dilihat dari kondisi penduduk Kabupaten/Kota Sumatra Utara, bahwa di beberapa Kabupaten/Kota Sumatra Utara dalam kurun waktu 2014-2018 tingkat kemiskinannya meningkat. Sehingga peneliti ingin mengetahui keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang nantinya akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh alokasi belanja modal, pembiayaan daerah, kapasitas fiskal, dan tingkat kemiskinan di Sumatra Utara kurun waktu 2014-2018.

## 2. Literatur Review

### a. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut Ariwuni & Kartika [5], kesejahteraan masyarakat yaitu sistem suatu bangsa tentang manfaat barang dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang penting bagi masyarakat. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena setiap orang mempunyai pedoman, tujuan, dan cara hidupnya yang berbeda-beda. Todaro & Smith [2] mengemukakan fungsi dari kesejahteraan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$W = W(Y, I, P) \quad (1)$$

Dimana W adalah kesejahteraan, Y adalah pendapatan per kapita dan berhubungan positif dengan fungsi kesejahteraan, I adalah ketimpangan yang berhubungan negatif, dan P adalah kemiskinan absolut yang juga memiliki signifikansi yang berbeda-beda, serta perlu mempertimbangkan ketiga elemen ini semua untuk mendapatkan penilaian yang menyeluruh terhadap kesejahteraan di negara berkembang.

Salah satu tolok ukur untuk melihat keberhasilan kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM dibuat untuk menekankan bahwa manusia dan kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai perkembangan suatu negara, bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup layak (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*) [6].

### b. Kebijakan APBD

Kebijakan APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun [7]. Dalam penelitian

ini, dari sisi pendapatan difokuskan pada kapasitas fiskal karena untuk melihat seberapa mandiri daerah tersebut untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Kemudian, untuk bidang belanja difokuskan pada alokasi belanja modal karena belanja tersebut digunakan untuk peningkatan dan perbaikan infrastruktur yang akan berdampak langsung kepada masyarakat. Bidang pembiayaan daerah difokuskan pembiayaan netto untuk melihat sisi deficit atau surplus dari penggunaan anggaran APBD.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi instrument penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terutama dalam pemanfaatan anggaran yang dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja tersebut dapat dilihat dari proses penyusunan APBD, pelaksanaan dan penerapan serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya [8]. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai pengaruh penting terhadap kesejahteraan masyarakat. Mangkoesobroto menjelaskan sumber penerimaan APBD berasal dari pajak masyarakat. Pungutan pajak masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah [9]. Sejalan dengan itu, Jhingan menegaskan pengeluaran pemerintah daerah untuk *overload* sosial dan ekonomi akan memberikan kesempatan kerja, menaikkan pendapatan sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Pengeluaran tersebut digunakan untuk perbaikan bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, perumahan murah dan pembangunan infrastruktur.

### c. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan di negara berkembang masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Kemiskinan adalah gambaran ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan adalah gambaran ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kehidupan layak. Guna mengukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah, kemiskinan menjadi salah satu faktor keberhasilan dan kegagalan pembangunan yang diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan [10].

Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan. Indikator yang digunakan adalah *Head Count Index* (HCI) yaitu jumlah persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan [11]

## 3. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal, pembiayaan daerah, kapasitas fiskal, dan tingkat kemiskinan. Sedangkan, variabel bebas adalah kesejahteraan masyarakat. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross-section*). Kelebihan dari data panel adalah memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, tingkat kolinieritas antarvariabel yang rendah, serta *degree of freedom*nya lebih besar [12].

Jenis data yang digunakan dalam penelitian data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Data *cross-section* dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota Sumatra Utara ( $i=33$ ). Sedangkan, data *time series* dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018 ( $t=5$ ). Selanjutnya model ekonometrika yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log ABM_{it} + \beta_2 PD_{it} + \beta_3 KF_{it} + \beta_4 \log KMS_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Dimana:

KM	: Kesejahteraan Masyarakat (Angka Indeks)
ABM	: Alokasi Belanja Modal (Miliar Rupiah)
PD	: Pembiayaan Daerah (Miliar Rupiah)
KF	: Kapasitas Fiskal (Angka Indeks)
KMS	: Tingkat Kemiskinan (Ribuan Jiwa)
$\beta_0$	: Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	: Koefisien regresi variabel independen
$\varepsilon_t$	: Komponen <i>error</i>
$\log$	: Operator logaritma berbasis $e$
$i$	: Data <i>time series</i>
$t$	: Data <i>cross section</i>

Langkah estimasi meliputi: (i) estimasi parameter model data panel dengan pendekatan *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM); (ii) pemilihan estimator data panel terbaik; (iii) uji signifikansi parsial pada model terpilih, dan (v) interpretasi koefisien determinasi pada model terpilih.

## 4. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis data berguna untuk melihat pengaruh alokasi belanja modal, pembiayaan daerah, kapasitas fiskal, dan tingkat kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara. Hasil analisis menggunakan regresi data panel dengan program *eviews* 10.

### 4.1. Hasil analisis

Hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), dapat dilihat pada [tabel 1](#).

**Tabel 1.** Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
C	59.62845	-120.3591	31.86837
$\log(\text{ABM})$	-1.420387	0.280616	0.610796
PD	0.005013	-0.000216	-0.000606
KF	2.645509	0.268099	0.502773
$\log(\text{KMS})$	2.617929	33.11984	5.916689
R-squared	0.252532	0.991705	0.273682
Adj.R-Squared	0.233538	0.989372	0.255524
F-statistik	13.49255	425.0768	15.07232
Prob F-Statistik	0.000000	0.000000	0.000000

Cara menentukan model terbaik dari hasil estimasi *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) digunakan uji Chow dan uji Hausman.

#### Uji Chow

Berdasarkan [tabel 2](#), terlihat bahwa probabilitas F-statistik uji Chow bernilai sebesar 0.0000 ( $\alpha < 0.1$ ) sehingga  $H_0$  ditolak yang berarti model mengikuti pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM).

**Tabel 2.** Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.

Cross-section F	356.582091	(32,128)	0.0000
Cross-section Chi-square	742.735172	32	0.0000

### Uji Hausman

Berdasarkan [tabel 3](#), terlihat bahwa probabilitas  $\chi^2$ -statistik uji Hausman bernilai sebesar 0.0000 ( $\alpha < 0.1$ ) sehingga  $H_0$  ditolak yang berarti model mengikuti pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM).

**Tabel 3.** Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	178.149883	4	0.0000

Dilihat dari hasil uji Chow dan uji Hausman dapat diketahui bahwa model terbaik untuk regresi data panel adalah pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Dari hasil regresi diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$KM_{it} = -120.3591 + 0.2806 \log ABM_{it} - 0.0002 PD_{it} + 0.2680 KF_{it} + 33.1198 \log KMS_{it} \quad (3)$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas hasil koefisien regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

1. Konstanta sebesar -120.3591 menyatakan jika semua variabel independent bernilai nol, maka kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara sebesar -120.3591
2. Nilai koefisien variabel alokasi belanja modal sebesar 0.2806, artinya apabila alokasi belanja modal naik 1 persen maka kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara meningkat sebesar 0.2806 angka indeks. Artinya variabel alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara
3. Nilai koefisien variabel pembiayaan daerah sebesar -0.0002, artinya apabila pembiayaan daerah naik 1 persen maka kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara menurun sebesar 0.0002 angka indeks. Artinya variabel pembiayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara
4. Nilai koefisien variabel kapasitas fiskal sebesar 0.2680, artinya apabila kapasitas fiskal naik 1 persen maka kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara meningkat sebesar 0.2680 angka indeks. Artinya variabel kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara
5. Nilai koefisien variabel tingkat kemiskinan sebesar 33.1198, artinya apabila alokasi belanja modal naik 1 persen maka kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara meningkat sebesar 33.1198 angka indeks. Artinya variabel tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara

### Uji Signifikansi Model Estimator Terpilih

Uji signifikansi pada model estimator terpilih dilakukan dengan tiga cara, yaitu uji signifikansi parsial atau uji t, uji signifikansi simultan atau uji F, dan uji koefisien determinasi atau  $R^2$ .

1. Uji Signifikansi Parsial atau uji t

[Tabel 4](#) menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap kesejahteraan di Sumatra Utara adalah alokasi belanja modal, kapasitas fiskal, dan tingkat kemiskinan. Sementara itu, pembiayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi yang lebih rendah dari  $\alpha$  untuk variabel selain pembiayaan daerah.

**Tabel 4.** Hasil Uji Signifikansi Parsial

Variabel	Koefisien	Prob. t-statistik	Kriteria	Kesimpulan
log(ABM)	$\beta_1$	0.090	<0.10	$\beta_1$ signifikan pada $\alpha = 0.10$
PD	$\beta_2$	0.689	>0.10	$\beta_2$ tidak signifikan
KF	$\beta_3$	0.008	<0.01	$\beta_3$ signifikan pada $\alpha = 0.01$
log(KMS)	$\beta_4$	0.000	<0.01	$\beta_4$ signifikan pada $\alpha = 0.01$

## 2. Uji Signifikansi Simultan atau Uji F

Berdasarkan **tabel 4** terlihat bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.000 ( $\alpha < 0.1$ ) yang berarti  $H_0$  ditolak, sehingga model yang dipakai eksis atau secara bersama-sama terdapat pengaruh alokasi belanja modal, pembiayaan daerah, kapasitas fiskal, dan tingkat kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 5.** Hasil Uji Signifikansi Simultan

F-statistic	425.0768
Prob(F-statistic)	0.000000

## 3. Uji Koefisien Determinasi atau $R^2$

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan daya ramal atau kebaikan suai dari model terestimasi. Berdasarkan **tabel 1** terlihat bahwa  $R^2$  dari model terestimasi yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) bernilai sebesar 0.992, artinya sebesar 99.2 persen variasi perubahan kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara tahun 2014-2018 dapat dijelaskan oleh variasi variabel alokasi belanja modal, pembiayaan daerah, kapasitas fiskal, dan tingkat kemiskinan. Sementara sisanya, yaitu sebesar 0.8 persen dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak diikutsertakan ke dalam model.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Alokasi Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan di Sumatra Utara Tahun 2014-2018

Hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara selama kurun waktu 2014-2018. Hal tersebut membuktikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara. Artinya apabila alokasi belanja modal naik maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Alokasi belanja modal yang digunakan secara optimal seperti untuk pembenahan infrastruktur serta fasilitas umum yang memadai akan meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan daerah, yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Kalimantan [13]. Serta penelitian Mirza (2015) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009 [14].

### 4.2.2. Pembiayaan Daerah Terhadap Kesejahteraan di Sumatra Utara Tahun 2014-2018

Hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa pembiayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara selama kurun waktu 2014-2018. Hal tersebut membuktikan bahwa hasil penelitian tidak sesuai dengan

hipotesis yang menyatakan pembiayaan daerah berpengaruh negative terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya perubahan pembiayaan daerah tidak akan menyebabkan kenaikan atau penurunan kesejahteraan di Sumatra Utara. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Peningkatan SiLPA dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi karena semakin besar dana yang mengendap di kas daerah, berarti tidak ada pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dengan terhambatnya pertumbuhan ekonomi maka secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat pun akan terhambat juga, karena tidak ada peningkatan fasilitas bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusreni & Suhab (2009) yang menyatakan pembiayaan daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Utara selama kurun waktu 2003-2007 [15].

#### **4.2.3. Kapasitas Fiskal Terhadap Kesejahteraan di Sumatra Utara Tahun 2014-2018**

Hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara selama kurun waktu 2014-2018. Hal tersebut membuktikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya apabila kapasitas fiskal naik maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Kapasitas fiskal mempunyai peran penting untuk menentukan kesejahteraan masyarakat. Tingginya kapasitas fiskal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam aktivitas produksi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kapasitas fiskal yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah menyediakan layanan publik dengan baik, sehingga kesejahteraan masyarakatnya meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusreni & Suhab (2009) yang menyatakan pembiayaan daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Utara selama kurun waktu 2003-2007 [15]. Hasil serupa juga didapat pada penelitian Murshed et al (2020), yang menunjukkan bahwa kapasitas fiskal mempunyai hubungan positif dengan kesejahteraan masyarakat yang berarti kapasitas fiskal penting dalam menopang kesejahteraan masyarakat [16].

#### **4.2.4. Tingkat Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan di Sumatra Utara Tahun 2014-2018**

Hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara selama kurun waktu 2014-2018. Hal tersebut membuktikan bahwa hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya apabila tingkat kemiskinan naik maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh penyeragaman kebijakan di setiap wilayah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Padahal setiap wilayah mempunyai masalah kemiskinan yang berbeda sehingga kebijakannya pun harus berbeda pula.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Invantoro & Efriyenti (2019) yang menunjukkan kemiskinan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Batam Tahun 2010-2017 [17].

## **5. Kesimpulan**

Analisis pengaruh alokasi belanja modal, pembiayaan daerah, kapasitas fiskal, dan tingkat kemiskinan di Sumatra Utara tahun 2014-2018 dengan menggunakan analisis regresi data panel diperoleh hasil bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif

terhadap kesejahteraan masyarakat yang berarti ketika alokasi belanja modal naik maka kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara juga akan meningkat dengan koefisien 0.2806 dan probabilitas  $0.08 < 0.1$ . Pembiayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang berarti perubahan pembiayaan daerah tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan kesejahteraan masyarakat di Sumatra dengan koefisien -0.0002 dan probabilitas  $0.68 > 0.1$ . Kemudian, kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang berarti ketika kapasitas naik maka kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara juga akan meningkat dengan koefisien 0.2680 dan probabilitas  $0.00 < 0.1$ . Tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang berarti ketika tingkat kemiskinan naik maka kesejahteraan masyarakat di Sumatra Utara juga akan meningkat dengan koefisien 33.119 dan probabilitas  $0.00 < 0.1$ .

Berdasarkan kesimpulan diatas, diharapkan pemerintah mengoptimalkan dan APBD untuk program pembangunan daerah yang strategis serta mencapai sasaran pembangunan yang ditargetkan. Dalam bidang kemiskinan, diharapkan pemerintah menjalankan program *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-growth*. Namun, lebih menekankan pada penciptaan lapangan kerja yang memadai. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat akan meningkat. guna pengembangan studi lebih lanjut, dapat memasukkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat seperti ketimpangan distribusi pendapatan, upah, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) serta pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan. Sebaiknya menggunakan metode yang berbeda dengan rentang waktu yang lebih panjang. Sehingga mendapatkan suatu hasil yang lebih baik dan tepat dibandingkan yang dilakukan saat ini.

## Referensi

- [1] B. Saputra and Mahmudi, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat," *J. Akunt. dan Audit. Indones.*, vol. 16, no. 2, pp. 185–199, 2012.
- [2] M. P. Todaro and S. C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, 11th ed. Jakarta: Erlangga, 2011.
- [3] D. B. Deswanto, A. Ismail, and H. Hendarmin, "Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015," *J. Ekon. Bisnis dan Kewirausahaan*, vol. 6, no. 3, pp. 187–210, 2017, doi: 10.26418/jebik.v6i3.23256.
- [4] A. Angelina, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Wilayah Malang Raya Tahun 2003-2017," *J. Ilm. Mhs. FEB*, vol. 7, no. 2, pp. 10–18, 2017.
- [5] M. A. D. Ariwuni and I. N. Kartika, "Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali," *E-Jurnal EP Unud*, vol. 8, no. 12, pp. 2927–2958, 2019.
- [6] United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 2020 The next frontier Human development and the Anthropocene*. 2020.
- [7] Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah," pp. 1–445, 2020.
- [8] Yuliaswati K, "Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah," *J. Katalogis*, vol. 5, no. 4, pp. 160–171, 2019, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/212467-urgensi>

- anggaran-pendapatan-belanja-daer.pdf.
- [9] G. Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik*, 3rd ed. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013.
- [10] Fajriwati, “Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan,” *Ekon. J. Ilmu Ekon. dan Stud. Pembang.*, vol. 16, no. 2, pp. 145–154, 2016, doi: 10.30596/ekonomikawan.v16i2.942.
- [11] Badan Pusat Statistik (BPS), “Indikator Kemiskinan,” 2020. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.htm>.
- [12] D. N. Gujarati, “Basic Econometrics,” *Basic Econometrics, Fourth Edition*. The McGraw-Hill, pp. 394–398, 2004.
- [13] P. R. Arini, “Pengaruh Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan,” *JRAMB*, vol. 2, no. 2, pp. 180–198, 2016.
- [14] D. S. Mirza, “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah,” *JEJAK*, vol. 4, no. 2, pp. 102–113, 2015, doi: 10.15294/jejak.v4i2.4645.
- [15] S. Kusreni and S. Suhab, “Kebijakan APBD dan Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan,” *J. Ilmu Ekon. dan Manaj.*, vol. 5, no. 3, pp. 1–18, 2009.
- [16] S. M. Murshed, B. Bergougui, M. Badiuzzaman, and M. H. Pulok, “Fiscal Capacity, Democratic Institutions and Social Welfare Outcomes in Developing Countries,” *Def. Peace Econ.*, vol. 32, no. 1, pp. 1–26, 2021, doi: 10.1080/10242694.2020.1817259.
- [17] D. Invantoro and D. Efriyenti, “Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia,” *Sci. J. J. Ilm. Mhs.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–10, 2019.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)